MEKANISME PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH (SUATU PERBANDINGAN ANTARA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Yulia Neta

ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diperhatikan jika terdapat kekosongan jabatan wakil kepala daerah, segera mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh undang-undang. Dengan keluarnya revisi Undang-Undang 32 tahun 2004 itu yaitu Undang-undang nomor 12 Tahun 2008, maka peluang untuk mengisi posisi Wakil Kepala Daerah itu terbuka luas, tinggal bagaimana pihak dewan menyeleksi para calon melalui sidang paripurna. Seperti halnya yang terjadi di Propinsi Lampung. Kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah Lampung Tengah dan Lampung Selatan merupakan persoalan cukup serius karena dapat berimplikasi pada berbagai hal, khususnya dalam kelancaran jalannya pemerintahan daerah setempat. Selain itu kekosongan yang berlarut-larut berpotensi menimbulkan gesekan, khususnya dikalangan parpol terkait siapa yang paling berhak menempati posisi tersebut.

Kata Kunci: Kepala Daerah, Jabatan Kepala Daerah, Otonomi Daerah.

A. PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) merupakan sarana perwujudan demokrasi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Gubernur, Walikota dan Bupati sebagai kepala Daerah pemerintah Propinsi, Kota dan Kabupaten di pilih secara demokratis. Begitu juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak lagi memberikan kewenangan kepada DPRD untuk memilih Kepala Daerah. Berdasarkan kenyataan tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, yang dalam undang-undang tersebut diatur tentang pemilihan secara langsung yang diatur mulai Pasal 56 sampai dengan Pasal 119 dalam undang-undang ini.

Keberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tidak serta merta dapat dilaksanakan dalam praktek,

Pelaksanaan Pilkada langsung diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam aturan-aturan ini juga secara tegas disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) yang menyelenggarakan pilkada langsung. Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai suatu lembaga daerah yang dibentuk dan dibubarkan dengan dan atau berdasarkan undang-undang sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan dalam Pasal 22 E UUD 1945. Pilkada secara langsung dinilai sebagai kerangka sistem (*system framework*) yang handal (*reliable*) untuk mengoptimalkan partisipasi publik, legitimasi politik akuntabilitas pemerintahan, serta meningkatkan sistem keseimbangan dan saling mengawasi (*check and balances system*) antara DPRD dan eksekutif daerah.¹

Di samping itu juga, Pasal 22 huruf e Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa

¹ (Jimly Assididqie, 2006: 238).

penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu lembaga pemilihan umum. Pemilihan umum tersebut dapat diselenggarakan oleh lembaga pemilihan umum baik secara nasional, tetap dan mandiri atau independent sebagai perwujudan dari penyelenggaraan suatu pemilihan umum di negara hukum yang demokratis atau konstitusional.

Pemilihan kepala daerah secara langsung juga selain merupakan manifestasi untuk meningkatkan kualitas suatu daerah juga merupakan cermin demokrasi, karena kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyatnya, sehingga berdampak positif bagi penguatan demokratis rakyat. Melalui sistem pilkada langsung diharapkan akan membawa implikasi baik bagi terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) bersih dan berwibawa. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Sejak Juni 2005, pilkada secara langsung dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia.²

Pemerintah Daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah, untuk Pemerintahan daerah propinsi yang terdiri atas pemerintah daerah propinsi dan DPRD propinsi dan untuk Pemerintahan daerah Kabupaten/kota yang terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dan DPRD Kabupaten/kota. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan jika terdapat kekosongan jabatan wakil kepala daerah, segera mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh undang-undang. Hal ini terjadi di Pemerintah Provinsi Lampung, dimana pada saat ini terjadinya kekosongan jabatan wakil kepala daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, hal ini disebabkan karena kepala daerah di kedua kabupaten tersebut mengundurkan diri dari jabatannya sebagai syarat untuk mengikuti Pilkada Gubernur Lampung periode 2009-2014.

Pengisian jabatan Wakil Bupati Lampung Selatan dan Wakil Bupati Lampung Tengah

merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan program-program pembangunan di kedua daerah tersebut, sebab kekosongan seorang wakil bupati akan membawa dampak kerugian bagi masyarakat, guna menjalankan roda pemerintahan yang baik (*good government*) maka segera melaksanakan pemilihan wakil bupati tanpa mengulur-ngulur waktu, membuang energi dan biaya yang berlebihan. Sehingga pelaksanaan pengisian jabatan wakil bupati tersebut dapat terlaksana dengan baik.³

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimanakah proses pengisian jabatan wakil kepala daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Selatan?
- Mengapa terdapat perbedaan mekanisme pengisian jabatan wakil Kepala Daerah antara Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan?

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis teori-teori, konsep-konsep, pandangan, literatur, serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memberikan arti secara tersirat maupun tersurat. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara menggali informasi dan penelitian lapangan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis data secara deskriptif kualitatif yang lebih menitik beratkan pada analisis yuridis.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

Pasca mundurnya Bupati Lampung Tengah (Hi. Andy Acmad Sampurna Jaya) dalam rangka maju sebagai calon Gubernur Lampung. Senin

² Diamond, Memupuk Demokrasi dan Penciptaan Tata Pemerintahan Lokal, <http://rechtboy.wordpress.com/desentralisasi-indonesia-memupuk-demokrasi-dan-penciptaan-tatapemerintahan-lokal/> diakses tanggal 19 Agustus 2009.

³ PWI Lampung, Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Di Beberapa Daerah, Khususnya Lamsel Dan Lamteng, <http://www.lampungpost.com>, diakses tanggal 22 Januari 2009.

tanggal 16 Juni 2008 Murdiyanto resmi menjadi Bupati Lampung Tengah yang dilantik Plt. gubernur Samsurya Ryacudu pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Lampung tengah selama kurang lebih 15 hari menjadi Plt. Bupati, Mudiyanto menjadi Bupati definitif untuk kurun waktu 2 tahun setengah melanjutkan tongkat kepemimpinan H. Andy Achmad Sampurna Jaya hingga November 2010.

Pelaku politik semakin gencar melakukan penajakan-penajakan untuk mencari pengganti wakil bupati mengingat Wakil Bupati Lampung Tengah diangkat sebagai pengganti bupati yang mengundurkan diri untuk maju sebagai calon gubernur. Kekosongan jabatan Wakil Bupati Lampung Tengah akan segera dilaksanakan pemilihannya pada Tahun 2009 dengan mengingat Keputusan DPRD Lampung Tengah Nomor 13/ DPRD/LT/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang peraturan tata tertib pencalonan dan pemilihan Wakil Bupati Lampung Tengah masa jabatan 2005-2010.

Proses pemilihan wakil bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 26 Ayat 4 Undang-Undang 12 Tahun 2008 dinyatakan untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari parpol atau gabungan parpol dan masa jabatannya masih tersisa 18 bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan dua orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul parpol atau gabungan parpol yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

Pelaksanaan desentralisasi pada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengartikan bahwa proses pemilihan wakil bupati diajukan empat nama calon yang diusung dari partai pemilu yang menang saat periode 2005-2010 dan mengajukan empat calon kepada bupati, kemudian penentuan dua nama tersebut menjadi hak prerogratif bupati Bupati Murdiyanto Thoyib yang memiliki kewenangan untuk menentukan dua nama calon wakil bupati dan selanjutnya diserahkan kepada DPRD Lampung Tengah dan ketua panitia pemilihan wakil bupati untuk memilih Wakil Bupati Lampung Tengah.

Calon Wakil Bupati Lampung Tengah diusulkan oleh partai politik pengusung yang calonnya memenangkan pemilihan bupati periode 2005-2010 dan mengajukan empat calon kepada

bupati. Empat calon itu adalah Bambang Suryadi (PDI-P), Syamsir Firdaus (Partai Demokrat), Musa Akhmad (PKB), dan Hasanusi (PPP). Mudiyanto Thoyib akhirnya menerima "bola panas" calon wakil bupati (cawakil bupati) yang diajukan Koalisi Lampung Tengah Bersatu (KLTB). Bupati harus menetapkan dua dari empat nama yang diajukan tersebut selambatnya, Rabu 4 Februari 2009 pukul 12.00. Menjelang penentuan dua nama calon wakil bupati (cawakil bupati), Bupati Lampung Tengah Mudiyanto Thoyib mengundang seluruh elemen terkait untuk membahas bersama. Tujuannya, proses penentuan calon wakil bupati dan proses pemilihan berjalan kondusif.

Berdasarkan surat undangan bernomor: 005/0032/02/2009, Bupati mengundang para bakal cawakil bupati, yakni Bambang Suryadi dari PDI-P, Hasanusi (PPP), Syamsir Firdaus (Partai Demokrat), dan Musa Ahmad (PKB). Bupati juga mengundang ketua DPRD Lampung Tengah beserta ketua panitia pemilihan wakil bupati (Penpemilihan wakil bupati). Ketua serta sekretaris partai pengusung yang tergabung dalam Koalisi Lampung Tengah bersatu (KLTB). Di tingkat eksekutif juga diundang pejabat sekretaris kabupaten, asisten bidang pemerintahan, staf ahli bidang pemerintahan, kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas, kabag Hukum, kabag Tapem, dan kabag Humas. Begitu juga dengan unsur Muspida Lampung Tengah pun turut diundang.

Pertemuan direncanakan Senin, 2 Februari 2009 di Nuwo Balak dengan agenda penandatanganan kesepakatan bersama keempat bakal calon sebelum Bupati Lampung Tengah Mudiyanto Thoyib kepada menyatakan akan menentukan dua nama calon dan menyerahkan kepada ketua DPRD dan panitia pemilihan wakil bupati. Penentuan dua nama tersebut menjadi hak prerogratif bupati, Setelah muncul dua nama calon yang ditetapkan bupati, 45 anggota DPRD akan memutuskan satu di antaranya yang layak mendampingi Bupati Mudiyanto hingga 2010. Menurut rencana, pemilihan dilakukan pada rapat paripurna 9 Februari 2009.

Bupati Lampung Tengah H. Mudiyanto Thoyib tanggal 4 Februari 2009 menetapkan Bambang Suryadi dan Musa Akhmad sebagai calon wakil bupati (cawakil bupati) untuk dipilih

pemerintahan yang baik (*good governance*) yang *Competence, Transparency, Accountability, Participation, Rule of Law*, dan *Social Justice*.

Proses Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

Kabupaten Lampung Selatan sama halnya dengan Kabupaten Lampung Tengah dimana kepala daerah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai syarat untuk mengikuti PILKADA Gubernur Lampung periode 2009-2014. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 pasal 26 ayat 3 menyatakan bahwa wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama enam bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya⁴. Hal ini menjelaskan bahwa pengisian jabatan kepala daerah yang mengundurkan diri maka wakil kepala daerah secara otomatis naik menjadi kepala daerah. Dengan Demikian Posisi jabatan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan secepatnya diisi dan dilakukan pemilihan, karena sudah ada aturan baku dari pemerintah pusat yakni mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan aturan itu, maka DPRD mendesak agar posisi jabatan Wakil Bupati segera diisi.⁴

Hal ini lebih dipertegas lagi, bahwa kekosongan jabatan wakil bupati di Lampung Selatan harus diisi karena telah menjadi amanat konstitusi dan bagian dari proses demokrasi dimana pengisian wakil bupati telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan PP Nomor 49 Tahun 2008 dalam hal ini pengisian jabatan wakil bupati mutlak harus dilakukan pemerintah kabupaten yang jabatannya tidak terisi dengan persyaratan yang diatur peraturan perundangan, keberadaan wakil bupati memiliki tugas dan fungsi sangat jelas.

Berdasarkan Penafsiran terhadap Undang-Undang tersebut bahwa empat nama cawakil bupati yang diusung oleh partai pemenang Hi. Zulkifli Anwar dan Hi. Wendi Melfa SH MH sebagai bupati dan wakil bupati, kemudian hak gabungan partai politik untuk menentukan dan mengusulkan dua (2) nama kepada bupati untuk diajukan ke DPRD. Hasil penetapan dua calon wakil bupati, kedua calon tersebut akan dipilih menjadi wakil bupati Lampung Selatan oleh ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan pada sidang paripurna.

Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, terdapat fenomena lambannya proses pemilihan wakil kepala daerah, fenomena tersebut terdapat tiga alasan yaitu *Pertama*, pertarungan politik antarpolitical atau gabungan partai pengusung Wakil kepala daerah tidak pernah mencapai kompromi. *Kedua*, stigma atau anggapan yang muncul bahwa posisi jabatan wakil bukan sesuatu yang penting dan tidak perlu diisi karena hanya sebagai pembantu kepala daerah. *Ketiga*, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kurang konsisten dan/atau tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan ataupun keputusan yang telah dibuat untuk melaksanakan pemilihan wakil kepala daerah. Selanjutnya kekosongan jabatan wakil kepala daerah disebabkan *political will* Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang sangat lamban menyikapi persoalan kekosongan jabatan tersebut.⁵

Selain fenomena tersebut terjadi terdapat stigma masyarakat Lampung Selatan yang menginginkan adanya wakil bupati dan menilai posisi wakil bupati yang kosong membuat pelayanan warga menjadi terhambat. Hal ini terbukti saat adanya pertemuan Forum Musyawarah Masyarakat Lampung Selatan yang mempertanyakan kekosongan wakil bupati pada tanggal 5 dan 8 Januari 2009. Menyikapi fenomena tersebut di atas, maka Bupati Lampung Selatan dan DPRD setempat akhirnya mengambil kata sepakat untuk berpedoman hukum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang revisi Terbatas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004

⁴ Armen Yaser Kekosongan Wakil Bupati Lampung Selatan (quo vadis kepemimpinan Lampung Selatan), <http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009011900354585>, diakses tanggal 19 Januari 2009.

⁵ Burhannudin, Kekosongan wakil bupati Lampung Selatan (quo vadis kepemimpinan Lampung Selatan), <http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009011900354585>, diakses tanggal 19 Januari 2009.

dalam mengawal jalannya Pemilihan Wakil Bupati Lampung Selatan. keputusan ini diambil dalam rapat yang digelar di ruang kerja Bupati Hi Wendy Melfa SH MH bersama pimpinan DPRD dan Ketua-ketua Fraksi

Surat DPRD Lampung Selatan No. 170/568/II.01/2008, tanggal 24 November 2008, ditujukan ke DPD Partai Golkar, DPC Partai Kebangkitan Bangsa, DPC Partai Demokrat, dan DPC Partai Sarikat Islam, Lampung Selatan agar menyerahkan nama calon wakil bupati kepada Panitia Pemilihan (Panlih) DPRD. Selanjutnya, Panlih menyerahkan ke Bupati Lampung Selatan. Calon wakil bupati yang diusung partai politik/gabungan partai politik yaitu: Irsanuddin Sagala diusung dari Partai Golkar, Irwan diusung Partai Serikat Indonesia, Risman Susunan diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Rusli Isya diusung Partai Demokrat. Calon-Calon tersebut diajukan parpol oleh panitia pemilih yang dibentuk DPRD, agar dapat ditetapkan menjadi dua calon dalam rapat paripurna DPRD.

Hasil penetapan dua calon adalah Irsanuddin Sagala yang diusung Partai Golkar dan Risman Sesunan yang diajukan PKB, kedua calon tersebut akan bersaing memperebutkan kursi wakil bupati Lampung Selatan. Dan proses pemilihannya harus sesuai dengan Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang No. 12/2008 dimana batas waktu pengisian wakil bupati diatur yaitu proses pemilihannya sudah dimulai sebelum masa jabatan bupati tersisa 18 bulan, sehingga batas akhir pemilihan tanggal 4 Februari 2009

Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan masa bhakti 2005-2010 pada hari senin tanggal 23 Februari 2009 digelar dalam suasana yang penuh ketegangan. Risman Sesunan, Cawakil bupati Lampung Selatan yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akhirnya memenangkan voting yang dilakukan oleh DPRD Lampung Selatan dengan 26 suara berbanding nol suara. Namun demikian setelah itu, Sidang kembali dilanjutkan. Dikarenakan tak memenuhi kuorum. Maka Sumadi meminta agar anggota Panmus mengadakan rapat kembali. Namun, hal itu tak digubris oleh anggota dewan yang hadir dan menginginkan pemilihan Wakil Bupati digelar kembali. Ketegangan kembali terjadi. Sumadi memilih Walkout, hal ini mengacu kepada Tata

tertib DPRD Lampung Selatan no 15 /DPRD-LS/2006 tentang perubahan revisi peraturan tatib DPRD Lampung Selatan Nomor 17/DPRD/LS/2005. Dalam pasal 74 tatib DPRD Lampung Selatan dijelaskan apabila belum tercapai quorum paripurna maka pimpinan harus meskor sidang selamanya 2x 1 jam. selanjutnya dalam ayat 2 dijelaskan dalam tatib bila skor pertama masih tidak mencapai quorum skor ditambah 1 jam lagi. dan pencabutan skor yang berlangsung maka pimpinan DPRD Sumadi, S.Sos sumadi membacakan tatib pemilihan Wakil bupati DPRD Nomor 02/DPRD-LS/2009 tentang tata cara pengisian jabatan wakil bupati Lampung Selatan periode 2005-2010 yang menjelaskan bahwa bila dalam 2 kali 1 jam masih tidak quorum maka paripurna harus ditunda selambat-lambatnya 2 hari. Berdasarkan tatib tersebut Sumadi langsung menunda sidang dan meminta anggota panmus untuk melanjutkan rapat pimpinan diruangnya. Namun penjelasan Sumadi langsung di interupsi oleh seluruh anggota DPRD peserta paripurna. namun tidak dihiraukan oleh sumadi yang langsung mengetuk palu sidang penundaan.

Seketika itu Wakil Ketua DPRD Lampung Selatan, Drs. Irwan langsung menjelaskan adanya aturan lain yang terdapat dalam tatib yang mana dijelaskan apabila seluruh aturan tersebut tidak mengakomodir maka bisa digunakan tatib umum yang ada dalam tatib persidangan DPRD dalam pasal 15/DPRD-LS/2006. Wakil Ketua DPRD lainnya, Antoni Imam, SE langsung membacakan tatib dan akhirnya setelah dibacakan, peserta sidang sepakat sidang paripurna di lanjutkan. Ketua DPRD Lampung Selatan, Hi Sumadi, S.Sos melihat aksi yang dilakukan oleh 2 wakilnya langsung melakukan Walk out dan meminta diri kepada bupati Lampung Selatan, Hi Wendy Melfa, SH MH yang duduk disebelahnya. sikap Walk Out Sumadi ini di aplus oleh beberapa simpatisan Irsanudin Sagala yang langsung ikut keluar bersama legislator dari partai Golkar tersebut.

Pasca Sumadi meninggalkan ruang Sidang, Pemilihan terus berlanjut yang diambil alih oleh Wakil Ketua Dewan Drs. Irwan dan Antoni Imam menyatakan bahwa rapat tetap dapat dilanjutkan merujuk pada Bab XIII pasal 74 Tatib 15/DPRD-LS/2006 tentang Perubahan Revisi Tatib DPRD NO 17/DPRD-LS/ 2005. Tercatat, pada ayat (2) jika kuorum belum tercapai pimpinan dapat

melanjutkan rapat sekurang-kurangnya dengan kehadiran $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota dewan keseluruhan. Pimpinan Sidang dengan persetujuan anggota Sidang akhirnya diambil alih oleh Wakil Ketua Drs. Irwan.

Pemungutan Suara dilanjutkan dengan jumlah akhir 26 suara anggota dewan memberikan hak pilihnya meskipun terjadi insiden dengan adanya beberapa orang tak dikenal mulai melempari botol-botol air mineral dan sampah makanan ke arah anggota dewan yang tepat berada di atasnya. Kemudian Suasana terus memanas saat perhitungan suara menyatakan bahwa Risman Sesunan mengantungi seluruh suara anggota dewan yang hadir. Sekretaris Dewan Thoharudin, SE membacakan rancangan keputusan Dewan penetapan wakil bupati terpilih Drs. H. Risman Sesunan yang menang dengan mengantungi 26 suara. Sementara lawannya yang tidak hadir Irsanuddin Sagala tak memperoleh suara dan sidang paripurna ditutup oleh Drs. Irwan dengan mengetuk palu. Menanggapi hasil pemilihan Ketua DPRD Lampung Selatan Sumadi, S.Sos.mengirim surat usulan ke gubernur dan Depdagri dengan No. 170/76/III.01/2009 yang isinya mengusulkan pembatalan hasil rapat paripurna pemilihan dengan alasan cacat hukum. Ketua DPD I Partai Golkar Lampung M. Alzier Dianis Thabranie mengatakan segera menghadap Gubernur Lampung dan Menteri Dalam Negeri yang akan mempertanyakan keabsahan paripurna sekaligus meminta Gubernur dan Menteri Dalam Negeri membatalkan hasilnya.

Secara terpisah, Sekretaris DPD PDI-P Lampung Nurhasanah mengatakan pihaknya tidak akan memecat anggota F-PDI-P DPRD Lampung Selatan yang tidak mengikuti paripurna itu. Tidak ada sanksi dan Partai tidak membuat kebijakan resmi mendukung calon mana pun. Tanggapan lain dari anggota F-PG, A. Bastian, dan Syahidan dari PKB menuding paripurna itu merupakan skenario Bupati dimana hasil ini menimbulkan pro-kontra. Padahal rapat bisa ditunda satu atau dua hari sampai memenuhi syarat kuorum, Irwan pun menegaskan pernyataan tersebut bahwa Pemilihan sudah sesuai dengan Tatib DPRD dimana Risman terpilih melalui pemungutan suara, bukan aklamasi dan kewenangan Bupati hanya sebatas menyampaikan dua nama kepada DPRD. Jadi tidak ada intervensi Bupati karena yang

berwenang memilih adalah DPRD. Menurut Arifin Tiang Negara, hasil keputusan sidang paripurna Kabupaten Lampung Selatan telah disampaikan ke Gubernur Lampung, namun Gubernur Lampung Syamsurya Ryacudu menolak usulan Risman Sesunan sebagai Wakil Bupati Lampung Selatan terpilih ke Departemen Dalam Negeri.

Gubernur menegaskan masa jabatan Wakil Bupati Lampung Selatan tersisa 18 bulan pada 4 Februari 2009, keputusan hasil rapat paripurna Kabupaten Lampung Selatan tidak sesuai dengan ketentuan dan apalagi terdapat masalah lain bahwa pelaksanaan sidang tidak kuorum, tetapi Gubernur tetap akan meneruskan surat tersebut ke Menteri Dalam Negeri dan sepenuhnya berada pada hak Menteri Dalam Negeri, begitu halnya dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri saat Gubernur berkonsultasi bahwajika rapat paripurna pemilihan dilakukan setelah tanggal itu, sudah kurang dari 18 bulan maka tidak sesuai lagi dengan amanat Undang-Undang dan tidak akan diproses.

Pernyataan Gubernur Lampung disikapi Risman dan menyatakan bahwa pemerintah pusat melalui Gubernur seharusnya mengambil sikap sebelum pemilihan jika ada masalah hukum. Namun, lanjut dia, hingga pemilihan selesai, Gubernur tidak membuat surat resmi terkait Pemilihan Wakil Bupati Lampung Selatan. Jika Menteri Dalam Negeri menafsirkan pemilihan telah melewati batas waktu, maka Risman bersama partai pendukung akan mengajukan analisis hukum.

Pernyataan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Wakil Bupati Lampung Selatan terpilih Risman Sesunan terdapat kesimpangsiuran terkait pemilihan wakil bupati muncul karena ada perbedaan dalam menafsirkan Undang-Undang. Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang 12 Tahun 2008 menyebutkan jika terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan, kepala daerah mengusulkan dua calon untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD berdasar pada usul parpol atau gabungan parpol pengusung dalam pilkada. Ada tiga penafsiran yang mencuat kini. *Pertama*, penafsiran 18 bulan dihitung sejak pelantikan bupati pengganti, *kedua*, sejak dimulainya pembahasan tata tertib pemilihan, dan *ketiga*, sejak pelaksanaan

pemilihan di DPRD. jika penafsiran ketiga, artinya terpilihnya Risman tidak sah.

Selain perbedaan penafsiran Undang-Undang, Pemilihan Wakil Bupati Lampung Selatan masih menyisakan persoalan seputar keabsahan paripurna DPRD. Dimana terdapat perbedaan persepsi antara Wakil Ketua DPRD Lampung Selatan Irwan, mengatakan pemilihan sesuai dengan tata tertib umum DPRD dimana dalam Pasal 7 Ayat (6) dan Bab X Pasal 13 disebutkan hal-hal yang tidak diatur dalam pedoman rapat paripurna bisa dilanjutkan dengan dihadiri setengah dari anggota Dewan yang hadir ditambah satu. Paripurna dihadiri 26 dari 44 anggota Dewan, sedangkan Ketua DPRD Lampung Selatan Sumadi menyatakan paripurna itu cacat hukum bahwa Rapat Panmus dan paripurna tidak kuorum.

Setelah menelaah hasil pemilihan wakil bupati, berkas diteruskan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung sebagai perwakilan pemerintah dimana Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Sekprop Lampung Akmal Jahidi mengatakan surat usulan itu dikirim ke Depdagri pada 10 Maret 2009. dan tinggal menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri. Polemik pelantikan Wakil Bupati Lampung Selatan Risman Sesunan terus berlanjut. Setelah Menteri Dalam Negeri (Menteri Dalam Negeri) Mardiyanto melalui Dirjen Otonomi Daerah Sodjuangan Situmorang No. 132. 18/902/OTDA tertanggal 7 April 2009 menyatakan menolak hasil rapat paripurna, untuk itu Departemen Dalam Negeri meminta Pemerintah Propinsi untuk memfasilitasi kembali proses Pemilihan Wakil Bupati Lampung Selatan ulang lantaran cacat mekanisme dan laporan hasil proses pemilihan wakil bupati paling lambat tanggal 25 April 2009.

Ketua DPRD, Hi Sumadi, S.Sos. menanggapi dan memutuskan sidang paripurna ulang pemilihan Wakil Bupati Lampung Selatan tanggal 22 April 2009, Sidang dibuka oleh Ketua DPRD yang memimpin rapat paripurna pemilihan wakil bupati. Saat sidang berlangsung sama halnya dengan sidang paripurna 23 Februari 2009 dimana sidang tersebut tidak memenuhi kuorum atau mencapai $\frac{1}{4}$ anggota DPRD yang hadir sebagai mana dalam tatib pemilihan dalam pemilihan itu hanya dihadiri oleh 21 anggota DPRD saja. namun Sumadi tetap melanjutkan paripurna, mengingat

deadline surat dari depdagri hasil pemilihan harus sudah dilaporkan sebelum tanggal 25 April 2009 dan Sumadi telah konsultasi dengan Gubernur Lampung melalui asisten I bidang pemerintahan dan mereka meminta paripurna untuk tetap dilanjutkan meskipun kondisi tidak quorum.

Pemilihan berlangsung lancar meskipun tanpa dibantu pejabat di lingkungan sekretariat DPRD dan Pemkab Lampung Selatan itu, Ketua DPRD Hi. Sumadi, S.Sos., meminta tiga orang anggota panlih yaitu Drs. Hi. A. Bastian Suyitno, Z. Arifin Tiang Negara, S.H., dan Ali Hasan Ibrahim langsung melakukan pemungutan suara sesuai dengan absensi kehadiran anggota DPRD. Dan hasil sidang dari dua puluh satu (21) anggota DPRD yang hadir semua memilih Irsanudin Sagala, S.T., sedangkan Drs. Risman Sesunan yang tidak hadir dalam paripurna tersebut tidak mendapatkan suara dalam pemilihan. Acara dilanjutkan dengan penutupan ketuk palu dan penetapan berita acara hasil paripurna pemilihan ulang Wakil Bupati Lampung Selatan yang dibacakan langsung oleh Ketua DPRD Lampung Selatan, Hi Sumadi, S.Sos., lantaran sekretaris DPRD tidak hadir dan berita acara paripurna pemilihan hari ini akan saya laporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Lampung agar segera dapat ditindaklanjuti.

Proses pemilihan wakil bupati ulang mendapat tanggapan dari berbagai pihak diantaranya Asisten III bidang Kesejahteraan Rakyat yang menyatakan bahwa proses pemilihan wakil bupati yang digelar lebih mengedepankan ego pribadi pimpinan DPRD secara personal saja, sebab dalam surat depdagri hanya meminta gubernur memfasilitasi saja bukan menggelar pemilihan wakil bupati ulang. Tanggapan lain oleh Anggota DPRD Lampung Selatan, Taufiq David, S.E. yang menyatakan bahwa seiring proses pemilihan ulang dilaksanakan, pendukung pemilihan wakil bupati 23 Februari, Drs. Risman Sesunan, M.Si., menghadap ke depdagri. Mereka meminta depdagri untuk segera melakukan pelantikan terhadap wakil bupati terpilih pemilihan Wakil Bupati 23 Februari, yaitu Drs. Risman Sesunan untuk segera dilantik. Menurut mereka semua mekanisme yang diatur dalam pemilihan telah berjalan sebagaimana mestinya dengan membawa lampiran kronologis proses pemilihan

Wakil Bupati yang digelar pada 23 Februari lalu kepada Dirjen Otda lengkap beserta audio visual proses pemilihannya. Hal ini akan dijadikan acuan untuk meyakinkan Depdagri bahwa tidak ada proses cacat mekanisme yang dilewatkan dalam pemilihan wakil bupati 23 Februari lalu.

Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lampung Selatan memiliki gejolak politik terkait proses pengisian jabatan Wakil Bupati Lampung Selatan periode 2005-2010 yang kosong semenjak ditinggalkan Wendy Melfa, S.H., M.H., akhirnya memunculkan dualisme dimana Kabupaten Lampung Selatan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan mempunyai dua orang wakil bupati terpilih. Hal ini menjadi tantangan bagi implementator otonomi daerah untuk menjawab persoalan tersebut.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pengisian jabatan wakil kepala daerah yang kosong di Propinsi Lampung yaitu pada daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan dilaksanakan berdasarkan pedoman pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 revisi Undang-Undang 32 Tahun 2004, ada beberapa perbedaan dimana pada Kabupaten Lampung Tengah pada proses pemilihan diajukan empat nama calon yang diusung dari partai pemilu yang menang saat periode 2005-2010 terpilih dan mengajukan empat calon tersebut kepada bupati. Kemudian penentuan dua nama tersebut menjadi hak prerogratif Bupati Murdiyanto Toyib yang memiliki kewenangan untuk menentukan dua nama calon wakil bupati yang akan diajukan pada sidang paripurna DPRD, Pelaksanaan rapat sidang paripurna memenuhi kuorum. Musa Akhmad terpilih menjadi wakil bupati, terpilihnya wakil Bupati tersebut sudah sesuai dengan amanah Undang-Undang yaitu masa jabatan kepala daerah kurang dari 18 Bulan. Pada Kabupaten Lampung Tengah ini proses demokrasi berjalan dengan baik sampai batas akhir masa jabatan anggota DPRD periode 2004-2009, sehingga pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lampung Tengah sebagai wujud pendelegasian wewenang dalam pemilihan Wakil Bupati Lampung Tengah berjalan dengan baik sehingga terpilihnya wakil bupati.

Sedangkan pada Kabupaten Lampung Selatan pada proses pemilihan oleh partai pemenang yang pada tahun 2005 mengusung Hi. Zulkifli Anwar dan Hi. Wendi Melfa SH MH sebagai bupati dan wakil bupati, mengusulkan empat nama calon wakil bupati dan disampaikan kepada Bupati, kemudian hak gabungan partai politik memilih dari empat nama cawakil bupati tersebut menjadi dua nama dan diusulkan kepada bupati untuk diajukan ke ketua DPRD dan panitia pemilihan wakil bupati, dalam hal ini bupati bukan penentu keputusan, melainkan hanya memfasilitasi mediasi antara keempat parpol pengusung dalam menentukan dua nama calon wakil bupati. Pelaksanaan rapat sidang paripurna tidak memenuhi kuorum dan terdapat anggapan bahwa terpilihnya wakil Bupati masa jabatan kepala daerah sudah lebih dari 18 Bulan, sehingga proses demokrasi tidak berjalan dengan baik sampai batas akhir masa jabatan anggota DPRD periode 2004-2009 berakhir. Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lampung Selatan sebagai wujud pendelegasian wewenang dalam pemilihan Wakil Bupati Lampung Selatan memiliki gejolak politik dimana terjadi dua kali putaran penetapan wakil bupati dan memunculkan dualisme karena terdapat dua orang wakil bupati terpilih.

C. PENUTUP

Berdasarkan Pembahasan di atas maka dapat disimpulkan:

- a. Berhasilnya proses pengisian jabatan wakil kepala daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan menetapkan Musa Ahmad sebagai wakil bupati merupakan implementasi pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat ke daerah Kabupaten Lampung Tengah. Dimana tujuan dari otonomi daerah adalah terciptanya demokratisasi dan terwujudnya kesejahteraan rakyat. Pedoman pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 revisi Undang-Undang 32 Tahun 2004.
- b. Proses pengisian jabatan wakil kepala daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tidak terselesaikan sampai saat ini.

Hal ini disebabkan adanya gejolak politik dalam implementasi pelaksanaan otonomi daerah dimana proses pemilihan telah melaksanakan sidang paripurna pemilihan sampai dua kali putaran dengan alasan sidang yang tidak kuorum dan waktu sudah lebih dari masa jabatan 18 bulan. Kabupaten Lampung selatan sebagai pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat untuk melaksanakan pemilihan sebagai perwujudan otonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan mengambil kebijakan untuk tidak melanjutkan pemilihan ulang karena anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang sedang defisit dan masa jabatan Bupati sudah lebih dari 18 bulan. Sehingga Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh perangkat daerah untuk tetap melanjutkan program-program pembangunan guna kesejahteraan rakyat yang menjadikan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*).

- c. Perbedaan mekanisme pengisian jabatan wakil bupati antara Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai Pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menjalankan proses pemilihan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 revisi Undang-Undang 32 Tahun 2004 Pasal 26 Ayat 4 yaitu terjadinya multi tafsir dalam proses pemilihan wakil bupati. Pada Kabupaten Lampung Tengah pelaksanaan sidang memenuhi kuorum, masa jabatan kurang dari 18 bulan dan demokrasi berjalan lancar dengan satu kali putaran sedangkan pada Kabupaten Lampung Selatan pelaksanaan sidang tidak memenuhi kuorum, masa jabatan lebih dari 18 bulan, jalannya demokrasi terjadi dua kali putaran hingga masa jabatan DPRD periode 2004-2009 berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ateng, Syafrudin, 1985, *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bina Cipta. Jakarta.
- Burhannudin. 2009. *Kekosongan wakil bupati Lampung Selatan (quo vadis kepemimpinan Lampung Selatan)*, <http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009011900354585>, diakses tanggal 19 Januari 2009
- Jahidi, Akmal. 2009. *Pemilihan Wakil Bupati (Pemilihan Wakil Bupati Bisa Digelar 2009)*, <http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=200812180002361>, diakses tanggal 18 Desember 2009.
- Kaho, Josef Riwi. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Aditya Bandung.
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. FHUII Pers, Yogyakarta.
- Sarundajang, 2001. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta..
- Sedarmayanti. 2007. *Good Governance and good corporate governance*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Supriyatna, Tjahya. 1996. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Syafrudin, Ateng. 1985. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bina Cipta. Jakarta.
- Syarifin. Pipin dan Jubaedah Dedah, 2006. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Setia. Bandung.
- Thoha, Miftah. 2000. *Peranan Administrasi Publik dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, UGM. Yogyakarta.
- Yasir, Armen. 2009. *Kekosongan Wakil Bupati Lampung Selatan (quo vadis kepemimpinan Lampung Selatan)*, <http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009011900354585>, diakses tanggal 19 Januari 2009.

Tabel 1. Perbedaan Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Bupati Antara Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan

NO	Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
1	hak prerogatif Bupati untuk menentukan dan mengusulkan dua (2) nama kepada bupati untuk diajukan ke DPRD	hak gabungan partai politik untuk menentukan dan mengusulkan dua (2) nama kepada bupati untuk diajukan ke DPRD
2	Pelaksanaan rapat sidang paripurna memenuhi kuorum	Pelaksanaan rapat sidang paripurna tidak memenuhi kuorum
3	Terpilihnya wakil Bupati sudah sesuai yaitu masa jabatan kepala daerah kurang dari 18 Bulan	Terpilihnya wakil Bupati masa jabatan kepala daerah sudah lebih dari 18 Bulan
4	Proses demokrasi berjalan dengan baik sampai batas akhir masa jabatan anggota DPRD periode 2004-2009	Proses demokrasi tidak berjalan dengan baik sampai batas akhir masa jabatan anggota DPRD periode 2004-2009 berakhir belum juga terselesaikan.
5	Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lampung Tengah sebagai wujud pendelegasian wewenang dalam pemilihan wakil Bupati Lampung Tengah berjalan dengan baik sehingga terpilihnya wakil bupati .	Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lampung Selatan sebagai wujud pendelegasian wewenang dalam pemilihan Wakil Bupati Lampung Selatan memiliki gejolak politik. Dimana terjadi dua kali proses pemilihan, dan memunculkan dualisme karena terdapat dua orang wakil bupati terpilih.